

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN  
ASLI DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2014-2018**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu  
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Manajemen (S.M) Program Studi  
Manajemen*



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Oleh :**

**Nama : ANGGI MAHARANI SIREGAR**  
**NPM : 1505160543**  
**Program Studi : MANAJEMEN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama : ANGGI MAHARANI SIREGAR  
NPM : 1505160543  
Program Studi : MANAJEMEN  
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN  
2014-2018

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Tim Penguji**

**Penguji I**

(HAZMANAN KHAIR, SE, MBA, Ph.D)

**Penguji II**

(NADIA IKA PURNAMA, SE, M.Si)

**Pembimbing**

  
(DODY FIRMAN, SE, MM)

**Panitia Ujian**

**Ketua**

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

**Sekretaris**

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : ANGGI MAHARANI SIREGAR  
N.P.M : 1505160543  
Program Studi : MANAJEMEN  
Konsentrasi : MANAJEMEN KEUANGAN  
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN  
ANGGARAN 2014-2018

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

  
DODY FIRMAN, SE, MM

Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi Manajemen

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

  
JASMAN SARIPUDDIN HSB, SE., M.Si

  
H. JANURI, SE., MM., M.Si

## SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : ANGGI MAHARANI SIREGAR  
NPM : 1505160543  
Konsentrasi : KEUANGAN  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (~~Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi~~  
~~Pembangunan~~)

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
  - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
  - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan. 26.11.2018  
Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIV / PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS  
 PROG. STUDI : MANAJEMEN  
 JENJANG : STRATA SATU (S-1)

KETUA PRODI : JASMAN SYARIFUDDIN HSB, SE, M.Si  
 DOSEN PEMBIMBING : DODY FIRMAN, SE, MM

NAMA MAHASISWA : ANGGI MAHARANI SIREGAR  
 NPM : 1505160543  
 KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN  
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
 PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENDAPATAN  
 DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN  
 ANGGARAN 2014-2018

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
20/02/2019	- Abstrak	/	
	- Pembahasan	/	
	- Asumsi Klarifikasi	/	
	- Kesimpulan & Saran	/	
	- Kesimpulan Silangbebas	/	
25/02/2019	- Perbaiki Abstrak	/	
	- Hasil Penelitian & Pembahasan	/	
	- Kesimpulan	/	
	- Saran	/	
	- Penelitian Terdahulu	/	
	- Kesimpulan Terakhir	/	
04/03/2019	- File diteruskan kepada Ke Prodi dan mengikuti sidang Meja Rundung	/	

Pembimbing Skripsi

DODY FIRMAN, SE, MM

Medan, Maret 2019  
 Diketahui / Disetujui  
 Ketua Program Studi Manajemen

JASMAN SYARIFUDDIN HSB, SE, M.Si

## ABSTRAK

**ANGGI MAHARANI SIREGAR. NPM. 1505160543. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2014-2018.**

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis baik secara parsial maupun secara simultan pengaruh PBB, Jumlah Penduduk, dan PDRB terhadap PAD Kab. Deli Serdang. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran periode tahun 2014 – 2018.

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, sumber data yaitu data primer yang bersumber dari kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Kemudian teknik analisis data menggunakan teknis analisis linear regresi berganda.

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa secara parsial PBB (Pajak Bumi Bangunan) memiliki nilai  $T_{\text{Hitung}} -0,812 < T_{\text{Tabel}} 2,015$  maka dapat disimpulkan  $H_A$  ditolak dan  $H_O$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa PBB tidak berpengaruh terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah), kemudian Jumlah Penduduk memiliki nilai  $T_{\text{Hitung}} 0,045 < T_{\text{Tabel}} 2,015$  maka disimpulkan  $H_A$  ditolak dan  $H_O$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD, dan untuk PDRB diperoleh  $T_{\text{Hitung}} -0,581 < T_{\text{Tabel}} 2,015$  maka dapat disimpulkan  $H_A$  ditolak dan  $H_O$  diterima. Selanjutnya hal ini menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap PAD.

Berdasarkan uji F diperoleh  $F_{\text{hitung}}$  sebesar 0,321 sedangkan  $F_{\text{tabel}}$  sebesar 5,41 maka  $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ . Maka  $H_a$  diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PBB, Jumlah Penduduk dan PDRB secara simultan (bersama-sama) tidak berpengaruh terhadap PAD.

Berdasarkan hal tersebut, saran yang diberikan penulis yaitu pemerintah daerah harus menerapkan strategi yang lebih baik, mengoptimalkan penerimaan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi daerah, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran PBB, pemerintah daerah harus memprioritaskan kesejahteraan masyarakat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

**Kata Kunci:** *PBB (Pajak Bumi Bangunan), Jumlah Penduduk, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan PAD (Pendapatan Asli Daerah).*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini, dimana skripsi ini sangat dibutuhkan penulis dalam rangka sebagai kelengkapan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan segala keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, dengan segala kerendahaan hati penulis mengharapkan para pembaca berkenan memberikan saran dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih untuk seluruh keluarga telah memberikan bantuan dan dukungan baik moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini .

Selanjutnya, tidak lupa penulis juga dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ayahanda Tongku Paradianan Siregar dan Ibunda Halimah Harahap yang merupakan inspirasi bagi penulis serta senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis.
2. Bapak Dr. H. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dodi Firman, SE, MM selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing saya dalam proses penyelesaian skripsi ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Seluruh Dosen dan Pegawai beserta Staf Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bantuan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak Pimpinan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang beserta seluruh pegawai yang telah memberikan kesempatan riset kepada penulis, dan juga banyak membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian ini.
8. Bapak Armansyah SE selaku Kepala UPTD Kecamatan Percut Sei Tuan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
9. Kepada Sahabatku Putri Widya Ningsih S.Pd dan Desy Dwi Jayanti yang tak kenal lelah menyemangati dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan penulis Rika Widya, Elza Salwa, Kiki Agustina, Bella Mustika, Nurul Fadilla, Shavira Amanda dan Adinda Paramita yang tentunya telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman Kantor Kecamatan Percut Sei Tuan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan apabila skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, penulis mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2019

Penulis,

**ANGGI MAHARANI S**

**1505160543**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Uraian Teori .....	11
1. Pendapatan Asli Daerah .....	11
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	11
b. Tujuan Pendapatan Asli Daerah.....	13
c. Faktor yang Mempengaruhi Indikator.....	
Pendapatan Asli Daerah .....	13
d. Indikator Pendapatan Asli Daerah.....	14
2. Pajak Bumi dan Bangunan .....	15
a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan .....	15
b. Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan.....	16
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pajak Bumi .....	
dan Bangunan.....	16

d. Indikator Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan .....	
dan Perkotaan .....	17
e. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan .....	
dan Perkotaan .....	17
3. PDRB .....	17
a. Hubungan PDRB Terhadap PAD .....	18
4. Jumlah Penduduk .....	19
a. Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap PAD .....	20
B. Peneliti Terdahulu .....	21
C. Kerangka Konseptual .....	23
D. Hipotesis .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	26
B. Definisi Operasional Variabel .....	26
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	28
D. Jenis dan Sumber Data .....	28
E. Teknik Pengumpulan Data .....	29
F. Teknik Analisis Data .....	29
1. Analisis Regresi Berganda .....	29
a. Uji Normalitas .....	31
b. Uji Multikolinearitas .....	31
c. Uji Heterokrdastisitas .....	31
2. Pengujian Hipotesis .....	33
a. Uji Secara Parsial (Uji T) .....	33

b. Uji Secara Simultan (Uji F).....	34
3. Koefisien Determinasi.....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Hasil Penelitian.....	36
1. Deskripsi Data Penelitian.....	36
2. Uji Asumsi Klasik .....	36
a. Uji Normalitas .....	36
b. Uji Multikolonieritas .....	38
c. Uji Heteroskedastisitas .....	38
3. Hipotesis.....	39
a. Uji Parsial (Uji T).....	39
b. Uji Simultan (Uji F) .....	41
c. Uji Koefisien Determinasi.....	42
B. Pembahasan .....	42
1. Pengaruh PBB Terhadap PAD .....	43
2. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap PAD .....	43
3. Pengaruh PDRB Terhadap PAD .....	44
4 .Pengaruh PBB, Jumlah Penduduk, PDRB Terhadap .... Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	44
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>45</b>
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran .....	45

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Anggaran dan Realisasi PBB di Kabupaten Deli Serdang .. T. A 2014 s/d T. A 2018 (dalam rupiah) .....	4
Tabel 1.2	Data Jumlah Penduduk Periode Tahun 2014-2018.....	5
Tabel 1.3	Data PDRB Deli Serdang Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas ... Dasar Harga Konstan 2010, 2014-2018 (dalam rupiah).....	6
Tabel 1.4	Data Pengeluaran Pemerintah terhadap PAD .....	
	di Kabupaten Deli Serdang T. A 2014 s/d T. A 2017 .....	
	(dalam rupiah).....	7
Tabel 3.1	Defenisi Operasionalisasi Variabel .....	27
Tabel 3.2	Jadwal Kegiatan.....	28
Tabel 4.1	Coefficients.....	38
Tabel 4.2	Hasil Uji T .....	40
Tabel 4.3	Hasil Uji F.....	41
Tabel 4.4	Hasil Uji R Square.....	42

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	24
Gambar 3.1 Uji Parsial ( Uji T ).....	31
Gambar 3.2 Uji Simultan ( Uji F ).....	34
Gambar 4.1 Histogram Dependent Variable: PAD .....	37
Gambar 4.2 Normal P_Plot Of Regression Stanndardized Residual.....	37
Gambar 4.3 Residuals Statistics PAD Scatterplot .....	39

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu sumber keuangan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satu bagiannya diperoleh dari penerimaan pajak daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat perubahan pembatasan jenis pajak yang dimana 16 jenis pajak yang dipungut oleh daerah yaitu 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota yang diantaranya yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak air bawah tanah, pajak BPHTB, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, serta pajak bumi dan bangunan.

Daerah Kabupaten Deli Serdang telah menetapkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah guna untuk menggali potensi-potensi pajak daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan juga membantu aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya. Melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Deli Serdang sebagai instansi pemerintah yang berfungsi dalam mengelola dan memantau sumber pendapatan asli daerah yang salah satunya adalah pajak yang diharapkan pendapatan daerah akan meningkat setiap tahunnya.

Peranan daerah Kabupaten Deli Serdang dalam pembangunan sangat menonjol. Melalui pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru telah

kelihatan meningkatnya pertumbuhan ekonomi diberbagai sektor di Deli Serdang, dimana sektor pertanian dan perkebunan menjadi pemeran utama dalam meningkatkan pendapatan para petani di Kabupaten Deli Serdang. Disamping itu peran serta masyarakat, swasta dan pemerintah terus bersinergi demi kesinambungan pembangunan Kabupaten Deli Serdang yang adil dan berkemakmuran.

Kesejahteraan masyarakat akan banyak bergantung pada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dikarenakan PAD menjadi salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah atau yang disingkat dengan PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan, guna keperluan yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD.

Pemerintah daerah dalam memaksimalkan otonomi daerah dan melaksanakan pembangunan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan asli daerah berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang lainnya.

Menurut Harefa dkk (2017, hal 29), “peningkatan PAD bisa dilakukan pemerintah daerah dengan cara melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan PAD oleh aparat daerah sehingga potensi penerimaan PAD dapat digali dengan sebaik-baiknya namun dengan tetap mengkaji agar dampaknya tidak sampai mengganggu perekonomian masyarakat”.

PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya. Sementara sumber keuangan yang berasal dari bantuan pemerintah pusat, umumnya sudah ditentukan untuk pembiayaan tertentu yang sifatnya mengikat. Karena itu sangat wajar jika pemerintah daerah berusaha bagaimana menggali PAD semaksimal mungkin agar bisa memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya demi perkembangan dan pembangunan daerahnya, khususnya di Kabupaten Deli Serdang.

Menurut Harefa (2017, hal 1), “Pajak daerah sebagai salah satu sumber pendanaan bagi daerah secara rata-rata nasional belum mampu memberikan kontribusinya yang besar bagi pembentukan pendapat asli daerah”.

Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006, “belanja daerah merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh daerah dan dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung”.

“Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya“, (Bultek 04 tentang Belanja).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sangat berpotensi untuk menunjang pendapatan daerah guna melaksanakan otonomi daerah dan pembangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu penerimaan pemerintah pusat yang sebagian besar hasilnya (90%) diserahkan kembali kepada daerah yang memungutnya hampir sebagian besar masyarakat memiliki tanah dan bangunan, maka sebuah keuntungan besar khususnya bagi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan karena tanah dan bangunan dapat diidentifikasi dan ditemukan. Berikut adalah tabel data anggaran dan realisasi PBB di Kabupaten Deli Serdang:

**Tabel 1.1 - Data Anggaran dan Realisasi PBB di Kabupaten Deli Serdang  
T. A 2014 s/d T.A 2018 (dalam rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>-</b>	<b>%</b>
2014	228.000.000.000,00	101.971.938.202,00	126.028.061.798,00	2,23
2015	228.000.000.000,00	124.938.033.757,00	103.061.966.243,00	1,82
2016	228.000.000.000,00	133.372.917.796,00	94.627.082.204,00	1,70
2017	237.500.000.000,00	141.364.693.425,00	96.135.306.575,00	1,68
2018	237.100.000.000,00	154.748.448.679,00	82.351.551.321,00	1,53

**Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang**

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat anggaran yang ditetapkan masih jauh dari realisasi yang dihasilkan. Pada tahun 2014 realisasi yang dihasilkan adalah sebesar Rp. 101.91.938.202,00 dan terus meningkat selama 4 tahun berikutnya. Pada tahun 2018 realisasi yang dihasilkan adalah sebesar Rp. 154.748.448.679,00. Semakin meningkatnya persentase realisasi tersebut maka akan sangat mempengaruhi pendapatan asli daerah tersebut.

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penentu adanya disparitas pendapatan antar daerah. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan, dan bukan satu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15 hingga 59 tahun, penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 59 tahun dianggap tidak produktif lagi karena kemampuannya tidak bisa optimal dalam melakukan pekerjaan Berikut adalah tabel data jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang:

**Tabel 1.2 – Data Jumlah Penduduk Periode Tahun 2014-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Jumlah KK</b>	<b>%</b>
2014	2.193.070	562.602	3,89
2015	2.241.652	592.254	3,78
2016	1.903.569	527.477	3,60
2017	1.920.315	516.905	3,71
2018	1.991.455	547.502	3,63

**Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Deli Serdang, 2018**

PDRB adalah merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun disuatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu.

Penyajian PDRB dibedakan dalam dua bentuk yakni PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku untuk melihat besaran nilai PDRB berdasarkan harga tahun berjalan. Penyajian PDRB atas dasar harga konstan adalah untuk melihat perkembangan PDRB dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan riil dan bukan disebabkan oleh kenaikan harga.

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang mungkin dapat diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB Per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Berikut adalah tabel data PDRB Deli Serdang Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan tahun anggaran 2014-2018:

**Tabel 1.3 - Data PDRB Per Kapita Deli Serdang Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2014-2018 (dalam rupiah)**

Tahun	ADH Konstan	ADH Berlaku	-	%
2014	55.790.000.000,00	69.674.000.000,00	13.884.000.000,00	80,07
2015	58.713.000.000,67	76.734.000.000,00	18.020.999.999,00	76,51
2016	61.839.000.000,00	85.152.000.000,00	23.313.000.000,00	72,62
2017	64.991.000.000,87	93.193.000.000,00	28.201.999.999,00	69,73
2018	69.565.000.000,16	101.121.000.000,00	31.556.000.000,00	68,79

**Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Deli Serdang, 2018**

Dari Tabel 1.3 diatas PDRB Deli Serdang atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2018 sebesar Rp. 101.121.000.000,00, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp. 69.565.000.000,16. Selama empat tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Kabupaten Deli Serdang adalah salah satu kabupaten yang diberi keleluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri dengan otonomi daerah. Kabupaten Deli Serdang yang bersumber dari Badan Pendapatan berdiri sejak masa kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang, namun pertumbuhan ekonominya belum begitu meningkat dibandingkan Kabupaten lainnya sehingga perlu di ketahui faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Berikut adalah data pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Deli Serdang yang terealisasi selama 5 (lima) tahun. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.4 Data Pengeluaran Pemerintah terhadap PAD di Kabupaten Deli Serdang T. A 2014 s/d T. A 2018 (dalam rupiah) sebagai berikut:

**Tabel 1.4 - Data Pengeluaran Pemerintah terhadap PAD di Kabupaten Deli Serdang T. A 2014 s/d T. A 2018 (dalam rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Pengeluaran Pemerintah (Rp)</b>	<b>PAD (Rp)</b>	<b>-</b>	<b>%</b>
2014	463.126.092.000,00	302.207.051.218,57	160.919.040.781	1,53
2015	463.126.092.000,00	369.060.712.118,63	94.065.379.881	1,25
2016	487.186.468.000,00	426.484.851.696,80	60.701.616.303	1,14
2017	582.022.000.000,00	553.610.032.994,03	28.411.967.006	1,05
2018	726.622.000.000,00	561.962.217.542,22	164.659.782.458	1,29

**Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Deli Serdang, 2018**

Dari tabel 1.4 diatas anggaran yang dikeluarkan terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap tahun berfluktuasi atau naik turun. Kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah. Kita ketahui memaksimalkan pendapatan daerah adalah salah satu cara untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap pemerintah pusat sehingga perlu dilakukan pendataan yang akurat terhadap data-data pendukung untuk meningkatkan realisasi pendapatan daerah baik dari sisi belanja daerah maupun dana-dana yang diberikan pemerintah propinsi atau pemerintah pusat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014-2018**".

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi PAD yang terdiri dari PBB, PDRB dan Jumlah Penduduk belum maksimal menunjukkan hasil yang negatif sesuai dengan data yang masuk di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014-2018.
2. Belum maksimalnya PBB, PDRB dan bertambahnya Jumlah Penduduk berdampak terhadap menurunnya Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan data yang masuk di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014-2018.

### **C. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah**

#### **1. Batasan Masalah penelitian ini adalah:**

Agar dapat terfokus dalam pembahasannya maka penelitian ini dibatasi pada PBB, PDRB, Jumlah Penduduk, PAD dan Laporan Anggaran Periode 2014-2018

#### **2. Rumusan Masalah penelitian ini adalah:**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh secara parsial PBB, PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap PAD di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014-2018 ?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan PBB, PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap PAD di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014-2018 ?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian ini adalah:**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial PBB, PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014-2018.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis secara simultan PBB, PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap PAD di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014-2018.

## **2. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:**

### **a. Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang pengaruh PBB, PDRB, dan Jumlah Penduduk dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014-2018.

### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan dapat menjadi acuan dalam memperbaiki kinerja instansi di masa yang akan datang.

### **c. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Manajemen Pemerintahan khususnya mengenai pengaruh PBB, PDRB, dan Jumlah Penduduk dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014-2018.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Pendapatan Asli Daerah**

###### **a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa :

Untuk melaksanakan otonomi daerah, khususnya asas desentralisasi, pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan dari empat kelompok yaitu :

- 1) Pendapatan Asli Daerah,
- 2) Dana Perimbangan,
- 3) Pinjaman Daerah,
- 4) Lain-lain penerimaan yang sah.

Menurut teori Darise dalam buku Harefa dkk (2017, hal 81), “Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004”.

Pembentukan UU No. 33 Tahun 2004 dimaksudkan “untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah“. Pendanaan tersebut menganut prinsip *follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Menurut Siahaan (2013, hal 14), bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi :

- a) Pajak daerah,
- b) Retribusi daerah,
- c) Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan,
- d) Lain-lain PAD yang disahkan “.

Sedangkan Menurut Harefa dkk (2017, hal 11), “Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Peningkatan PAD tidak hanya menjadi perhatian pihak eksekutif, namun legislatif pun berkepentingan sebab besar kecilnya PAD akan mempengaruhi struktur gaji anggota dewan”.

Pendapatan asli daerah (PAD) menurut Djaenuri (2014, hal 88) adalah “penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ” .

Pendapatan daerah adalah “hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (Pasal 1 Angka 15 UU no. 17/2003)”. Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah yang disahkan pada tanggal 15 Oktober 2004, sumber pendapatan Daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah; dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan yang sah”.

Menurut Kuncoro dalam Harefa dkk (2017, hal 13), “dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, PAD menjadi faktor yang sangat penting dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20% ”.

Menurut Djaenuri (2012, hal 52) menyatakan bahwa “dengan pendekatan pendapatan, kepala daerah diberi sejumlah kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu untuk kemudian berdasarkan penyerahan kewenangan tersebut kepada daerah diberikan sumber-sumber penerimaan keuangan tertentu”.

Pada prinsipnya, pemanfaatan sumber-sumber penerimaan tersebut. Kewenangannya sepenuhnya ada ditangan pemerintah daerah. Wujud dari pendekatan ini kepada daerah diberikan, baik berupa sumber pendapatan asli daerah maupun bantuan dalam bentuk dana perimbangan.

#### **b. Tujuan Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang 33 Tahun 2014 Pasal 3, tujuan PAD yaitu, “Memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi”. Dalam upaya peningkatan PAD maka daerah dilarang:

1. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
2. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor atau ekspor.

#### **c. Faktor yang Mempengaruhi Indikator Pendapatan Asli Daerah**

Ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah suatu daerah, yaitu :

1. Faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal terdiri dari Investasi, Inflasi, PDRB dan jumlah penduduk, sedangkan
2. Faktor internal dari saran dan prasarana, intensif, penerimaan subsidi, penerimaan pembangunan, sumber daya manusia, peraturan daerah, sistem dan pelaporan..

#### **d. Indikator Pendapatan Asli Daerah**

Indikator dari Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

1. Pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Dibawah ini merupakan pengertian dari beberapa indikator dari pendapatan asli daerah:

1. Pajak daerah

Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public investment.

2. Hasil retribusi daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimasukkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

#### 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

## **2. Pajak Bumi dan Bangunan**

### **a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, "pajak bumi dan bangunan adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. pajak bumi dan bangunan merupakan suatu potensi yang harus terus diraih dalam meningkatkan penerimaan daerah dikeranakan objek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang setiap masyarakat memilikinya".

Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. dengan demikian, subjek pajak diatas menjadi wajib pajak PBB (Undang-Undang No.28 Tahun 2009). Jadi subjek pajak tersebut dapat berupa pemilik, pemegang kuasa, dan penyewa.

Menurut Erly Suandy (2016, hal 59) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh

keadaan objek, yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak.

Menurut Mardiasmo (2018, hal 389), “Pajak Bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat”.

Menurut Mardiasmo (2018, hal 390), “Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan”.

### **b. Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan**

Dilihat dari aspek pemungutan, menurut Diana (2013, hal 145) tujuan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu :

1. Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah (termasuk pengalihan PBB-P2 dan BPHTB menjadi Pajak Daerah)
3. Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah.
4. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

### **c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pajak Bumi dan Bangunan**

Kementerian keuangan Republik Indonesia (2014, hal 77) menyatakan bahwa hal-hal yang ditenggarai berpengaruh besar terhadap penerimaan PBB-P2 di daerah adalah:

1. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membayar pajak
2. Masyarakat belum memahami fungsi pajak
3. Kekeliruan dalam dokumen penetapan
4. Tarif yang terlalu besar
5. Belum tegasnya penerapan sanksi hukum terhadap pajak daerah
6. Kurangnya sarana dan prasarana

#### **d. Indikator Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Berdasarkan Qanun Nomor 4 tahun 2012, indikator atau dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu:

1. Njop sampai dengan Rp. 1.000.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 0,10%
2. Njop diatas Rp. 1.000.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 0,20%
3. Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan rumah lingkungan dan/atau merupakan bangunan atau lingkungan cagar budaya, maka dapat diberikan pengurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pajak bumi dan bangunan.

#### **e. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Menurut Qanun Nomor 4 tahun 2012 menjelaskan bahwa “yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan”. Berikutnya, juga dijelaskan yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tempat olahraga
- f. Galangan kapal, Dermaga
- g. Taman mewah
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- i. Menara.

### **3. PDRB**

PDRB perkapita merupakan nilai proksi dari pendapatan setiap jumlah penduduk yang diperoleh dari jumlah pdrb dibagi jumlah penduduk, yang bisa sebagai gambaran daya beli masyarakat. Suatu perekonomian sedang tumbuh dan berkembang apabila adanya serangkaian peristiwa yang timbul untuk mewujudkan peningkatan pendapatan perkapita dalam jangka panjang. sehingga sekalipun ada satu waktu dimana pendapatan perkapita seolah-olah terhenti

namun diwaktu yang akan datang terjadi peningkatan pendapatan, maka ini terdapat pembangunan ekonomi.

Menurut Djaenuri (2014, hal 105) PDRB menyatakan “sektor non primer adalah PDRB diluar sektor sumber daya alam. Angkatan kerja adalah jumlah penduduk usia produktif, yaitu antara usia 15 sampai dengan 64 tahun. Dan suatu daerah adalah kebutuhan daerah yang bersangkutan dikurangi potensi ekonomi daerah “.

Pendapatan yang diterima rumah tangga berasal dari dua sektor yaitu dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan untuk sektor perusahaan dan dari pembayaran gaji dan upah untuk sektor pemerintah. Dengan demikian PDRB perkapita adalah sebagai proksi pendapatan masyarakat akan berpengaruh terhadap konsumsi, dengan kata lain meningkatnya pendapatan masyarakat tentunya mengarah kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga meningkat, karena bagaimana pun juga masyarakat terikat pada kebutuhannya akan barang dan jasa. sejalan dengan hal tersebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terpengaruh secara positif seiring dengan peningkatan PDRB perkapita tersebut.

#### **a. Hubungan PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pelaksanaan otonomi melalui desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah sub nasional atau pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang- barang publik. Hubungan antara PDRB dengan PAD merupakan hubungan secara fungsional, karena pajak daerah merupakan fungsi dari PDRB yaitu dengan meningkatnya PDRB akan meningkatkan PAD dan PDRB merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi.

## 1. Jumlah Penduduk

“Pengertian penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah Geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan dengan tujuan untuk menetap” (BPS, 2014 hal 68).

Teori Hansen mengenai stagnasi sekular (*secular stagnation*) “Bertambahnya jumlah penduduk justru akan menciptakan atau memperbesar permintaan agragatif terutama investasi. Penduduk memiliki dua peranan dalam pembangunan ekonomi. Dalam konteks pasar ia berada di sisi permintaan maupun penawaran. di sisi permintaan penduduk bertindak sebagai konsumen yang merupakan sumber permintaan akan barang dan jasa”.

“Di sisi penawaran penduduk sebagai produsen, jika Ia adalah pengusaha atau tenaga kerja jika ia semata-mata pekerja” (BPS, 2014 hal 73). Perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi, jika penduduk ini mempunyai kapasitas tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan.

Ini berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan disertai dengan tingkat penghasilan tinggi yang pula. dan bisa juga sebaliknya jika jumlah pertambahan penduduk tinggi tetapi penghasilan rendah maka tidak ada gunanya bagi pembangunan ekonomi. Setiap daerah selalu menetapkan target tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dalam perencanaan dan tujuan pembangunan di daerahnya. karena semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka semakin tinggi kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sehingga semakin tinggi pula kemampuan suatu daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya.

### **a. Hubungan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia oleh perencanaan pembangunan dipandang sebagai aset modal besar pembangunan tetapi bisa juga sebagai beban. Pembangunan sebagai aset apabila dapat meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur, persebaran, dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif. Setiap kenaikan jumlah penduduk bukan jadi masalah melainkan bisa dijadikan sebagai pertumbuhan dan berkembang di suatu wilayah karena penduduk memiliki peran penting dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, semakin banyak jumlah penduduk maka nilai investasi di suatu wilayah akan meningkat. Bisa dilihat dari pungutan pajak daerah dan pendapatan asli daerah di suatu wilayah tertentu. Teori Ekonomi klasik memandang bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang di gunakan. Penambahan jumlah penduduk yang tinggi di iringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan suatu hal yang di butuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

## **B. Peneliti Terdahulu**

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mesra B (2017) dengan judul jurnal “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara” yang menemukan hasil bahwa jumlah penduduk, pdrb, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini sejalan dengan Hafsah dengan judul “Efektivitas Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan” yang menemukan hasil bahwa faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya PBB karena masih banyaknya wajib pajak yang belum melunasi hutang pajaknya. Hal ini mengakibatkan terjadinya penunggakan dalam pembayaran pajak, sehingga menyebabkan penerimaannya tidak mencapai jumlah target yang ditentukan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Miragustia Mayza dkk (2015) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh” yang menemukan hasil berdasarkan uji f bahwa variable jumlah penduduk, rasio (PDRB) secara bersama-sama mempengaruhi PAD. Sedangkan uji t menunjukkan hasil bahwa variable jumlah penduduk tidak berpengaruh pada PAD, namun rasio (pengeluaran pemerintah/PDRB) berpengaruh terhadap PAD.

Penelitian ini sejalan dengan Diana Lestari (2016) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda” yang menunjukkan hasil secara parsial PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap PAD.

Penelitian ini sejalan dengan Ni Putu Dian dan I Putu Ery (2014) dengan judul penelitian “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB Terhadap PAD Kota Denpasar Tahun 2009-2013” yang menemukan hasil bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2009-2013 dikatakan sangat efektif dengan presentase melebihi dari 100% dan tingkat kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap PAD pada tahun 2009-2013 dikatakan kurang dengan presentase dibawah 50%.

Penelitian ini sejalan dengan Gede Bhaskara dan AA Bagus (2014) dengan judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar” bahwa ditemukan dua hasil secara simultan variabel PDRB jumlah penduduk dan jumlah wisatawan memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan secara parsial variabel, jumlah penduduk dan jumlah wisatawan tidak memiliki pengaruh terhadap PAD di Kota Denpasar. Hal ini berbanding terbalik dengan PDRB yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Denpasar tahun 1999-2011.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Riandani Rezki (2016) dengan judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Tebing Tinggi” yang menemukan hasil bahwa apabila PDRB naik 1% maka akan meningkatkan PAD, sebaliknya jika PDRB turun 1% maka PAD juga menurun.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hibzon (2007) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Selatan” yang menemukan hasil bahwa secara spesifik Pendapatan Asli

Daerah di Sumatera Selatan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan pendapatan perkapita.

### **C. Kerangka Konseptual**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengelolaan negara, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu objek pajak yang diharapkan pemerintah daerah untuk dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu wilayah, semakin besarnya pajak bumi dan bangunan yang di dapat maka akan semakin menambah pendapatan asli daerah, sehingga pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur di wilayah tersebut dapat berjalan dengan baik. apabila pembangunan berjalan dengan baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut dapat terwujud.

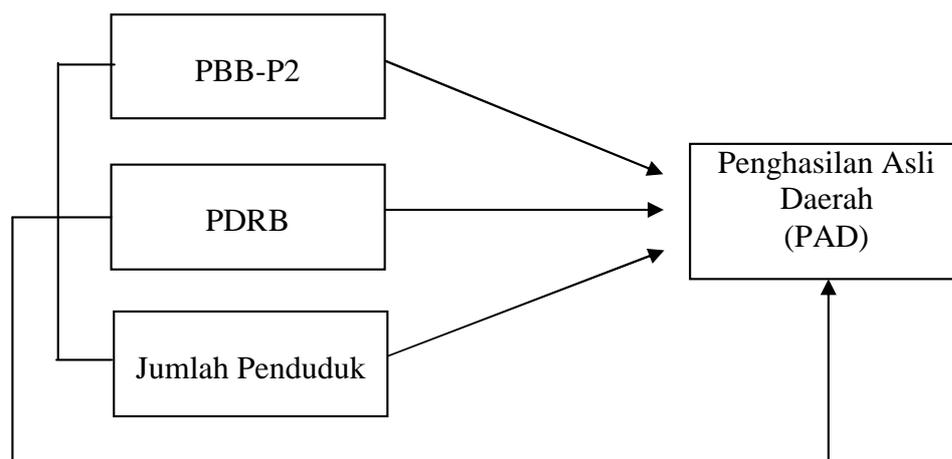
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku. Variabel lain yang menarik untuk dikaji ialah pajak bumi & bangunan. Dimana PBB adalah

pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan bangunan keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Mulai 1 Januari 2014, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) sudah sepenuhnya dikelola oleh seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. dengan demikian, PBB-P2 telah dialihkan menjadi pajak Kabupaten/Kota, sementara PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan pertambangan (P3) masih menjadi pajak pusat. Selanjutnya pajak bumi & bangunan disuatu daerah akan menjadi stimulus dalam tumbuh dan berkembangnya PAD. Diharapkan pajak bumi & bangunan menjadi salah satu dari sekian banyak yang dapat menyumbangkan peningkatan PAD disuatu daerah.

Berdasarkan uraian sebelumnya dan untuk memperjelas hubungan antara variabel-variabel berikut ini dikemukakan kerangka konseptual seperti terlihat dalam gambar 2.1:



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan uraian kerangka konseptual, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. PBB, PDRB dan Jumlah Penduduk secara parsial berpengaruh terhadap PAD di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014-2018.
2. PBB, PDRB dan Jumlah Penduduk secara simultan berpengaruh terhadap PAD di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014-2018.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Didalam proposal skripsi ini, metode yang akan digunakan untuk melakukan penelitian yaitu penelitian deskriptif kuantitatif, karena menguji hipotesis dengan menggunakan alat analisis statistik dan dijelaskan secara deskriptif. Data kuantitatif merupakan data statistik berbentuk angka-angka, baik secara langsung digali dari hasil pengolahan data kualitatif menjadi kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2012, hal 13), “ metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya digunakan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan “.

Tujuan dari penelitian deskriptif kuantitatif yaitu menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka dan memerhatikan pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk numerik. Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah Perolehan Pajak Bumi dan Bangunan, PDRB, Jumlah penduduk, sedangkan variabel dependen (Y) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, yang bertujuan untuk melihat sejauh mana pentingnya variabel yang digunakan

dalam penelitian ini dan mempermudah pemahaman dan membahas penelitian nantinya.

Adapun variabel penelitian yang akan diteliti sebagai berikut :

- 1) Variabel independen yaitu PBB, PDRB dan Jumlah Penduduk
- 2) Variabel dependen yaitu PAD

Operasionalisasi Variabel, Definisi Variabel, parameter Variabel, dan Skala Pengukuran untuk pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

**Tabel 3.1 - Defenisi Operasionalisasi Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>
Perolehan Pajak Bumi dan Bangunan	Sebagai sumbangan yang diberikan oleh penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah	$\frac{\text{RealisasiPenerimaanPBB}}{\text{RealisasiPAD}} \times 100\%$	Rasio
PDRB	Pendapatan jumlah penduduk yang diperoleh dari jumlah PDRB dibagi jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu.	Data PDRB dari Tahun 2014-2018 di Kabupaten Deli Serdang	Rasio
Jumlah Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan dengan tujuan untuk menetap	Jumlah Jiwa	Rasio
Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan untuk anggaran belanja modal	Pajak daerah, Restribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang Sah	Rasio

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Waktu penelitian direncanakan mulai bulan Desember 2018 sampai dengan Januari 2019. Jadwal penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini:

**Tabel 3.2 – Jadwal Kegiatan**

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu															
		Oktober				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■															
2	Identifikasi Masalah		■	■	■												
3	Pengumpulan Data					■	■	■	■								
4	Pengolahan Data									■	■	■	■				
5	Analisis Data													■	■	■	■
6	Penyelesaian Laporan Akhir																■

### D. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif yaitu berupa laporan Realisasi Anggaran PBB ,PAD, PDRB, dan jumlah penduduk berdasarkan tahun anggaran 2014-2018.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data primer yang merupakan realisasi anggaran PBB, PDRB, Jumlah Penduduk yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yang dilakukan dengan mengambil data-data serta mengumpulkan data primer berupa laporan keuangan. Kemudian mempelajari dan menganalisis uraian-uraian yang bersifat literature ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara dokumentasi.

Menurut Arikunto (2010, hal 201), “metode dokumentasi adalah menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Sedangkan wawancara menurut Arikunto (2010, hal 198) adalah dialog yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari telewicara (interview)”.

Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari laporan target dan realisasi Perolehan Pajak Bumi dan Bangunan dan laporan realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

#### **1. Analisis Regresi Berganda**

Menurut Sugiyono (2012, hal 277), “ analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis

regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2 (dua)".

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen yang jumlahnya dua atau lebih dari dua terhadap variabel dependen (Y). Untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan perangkat lunak SPSS. Persamaan analisis regresi linear berganda secara umum dalam menguji hipotesis-hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y	= Variabel PAD
a	= Konstanta
b <sub>1</sub>	= Koefisien regresi variabel X <sub>1</sub>
b <sub>2</sub>	= Koefisien regresi variabel X <sub>2</sub>
b <sub>3</sub>	= Koefisien regresi variabel X <sub>3</sub>
X <sub>1</sub>	= Variabel PBB
X <sub>2</sub>	= Variabel Jumlah Penduduk
X <sub>3</sub>	= Variabel PDRB
e	= <i>Error</i> / variabel yang tidak diteliti

Syarat yang mendasari metode regresi berganda adalah terpenuhinya semua asumsi klasik, agar hasil pengujian tidak bias. Adapun uji asumsi klasik sebagai berikut:

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

#### b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat *tolerance value* atau menggunakan *Variance Inflation Factors* (VIF). Multikolinearitas terjadi apabila nilai  $VIF \geq 10$  dan *tolerance value*  $\leq 0,10$  dan sebaliknya multikolinearitas tidak terjadi apabila  $VIF \leq 10$  dan *tolerance value*  $\geq 0,10$ .

#### c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut *Homokedastisitas* dan jika berbeda disebut *Heterokedastisitas*. Model regresi yang baik adalah yang *Homokedastisitas* atau tidak terjadi *Heterokedastisitas*. Uji *heterokedastisitas* dapat diuji dengan dua cara yaitu:

#### 1. Grafik Plot

Dasar analisis dari uji heterokedastisitas melalui grafik plot adalah sebagai berikut:

- a. Jika pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas.

#### 2. Uji Glejser

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melakukan uji Glejser. Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen dengan persamaan regresi:

$$|U_t| = \alpha + \beta X_t + v_t$$

Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel independen, maka ada indikasi terjadi Heterokedastisitas, dan jika probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5%, maka model regresi tidak mengandung adanya Heterokedastisitas.

## 2. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (Uji t) dan penyajian secara simultan (Uji F).

### a. Uji secara Parsial/Individual (Uji-T)

Uji parsial atau uji-t adalah untuk menguji apakah suatu variabel bebas berpengaruh secara individu terhadap variabel terikatnya. Bentuk pengujiannya adalah sebagai berikut :

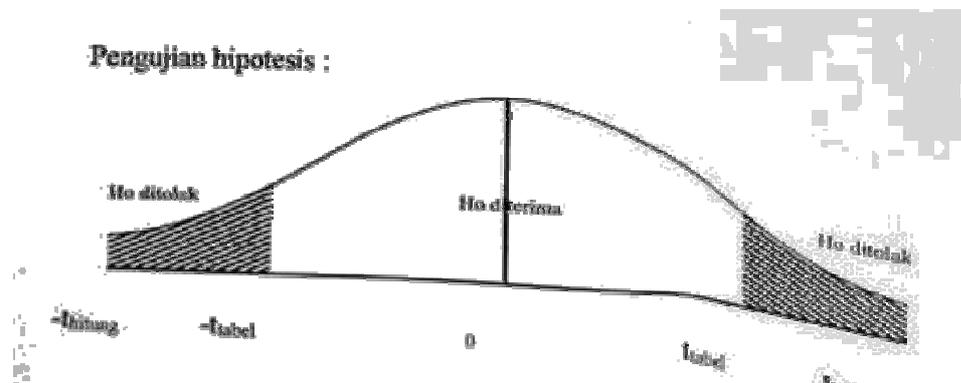
$H_0$  :  $b_i = 0$  (PBB, PDRB dan Jumlah Penduduk secara parsial tidak berpengaruh terhadap PAD di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014-2018).

$H_a$  :  $b_i \neq 0$  (PBB, PDRB dan Jumlah Penduduk secara parsial berpengaruh terhadap PAD di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014-2018).

Selanjutnya akan dilakukan uji signifikansi dengan membandingkan tingkat signifikansi ( $\alpha$ )  $\alpha = 5\%$  dan derajat kebebasan ( $n-k$ ) dengan  $t_{hitung}$  yang diperoleh :

Terima  $H_0$  bila  $t_{hitung} < t_{tabel}$

Tolak  $H_0$  (Terima  $H_a$ ) bila  $t_{hitung} > t_{tabel}$



Gambar 3.1 – Uji Parsial ( Uji T)

### b. Uji secara Simultan/Serempak (Uji-F)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan (serempak) terhadap variabel terikat.

Bentuk pengujiannya adalah sebagai berikut :

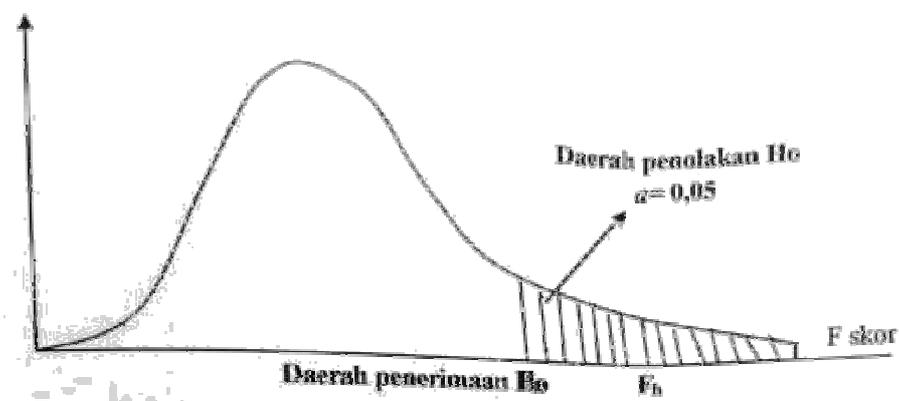
$H_0$  :  $b_i = 0$  (PBB, PDRB dan Jumlah Penduduk secara simultan tidak berpengaruh terhadap PAD di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014-2018).

$H_a$  :  $b_i \neq 0$  (PBB, PDRB dan Jumlah Penduduk secara simultan berpengaruh terhadap PAD di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014-2018).

Pengaruh variabel independen terhadap dependen di uji dengan tingkat kepercayaan (*confidence interval*) 95% atau pada alpha  $\alpha = 5\%$ . Untuk menguji apakah hipotesis ditolak atau diterima digunakan statistik uji F :

Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, dan

Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.



Gambar 3.2 – Uji Simultan (Uji F)

### 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai Koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Begitu pula sebaliknya, nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Determinasi dapat dinyatakan dengan rumusan sebagai berikut :

$$D = R^2 \times 100\%$$

Dimana :

D : Koefisien Determinasi

R : Koefisien korelasi variabel bebas dengan variabel terikat

100% : Persentase Kontribusi

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Deskripsi Data Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengolahan data dari laporan realisasi anggaran tahun 2014 – 2018, adapun data yang diambil yaitu:

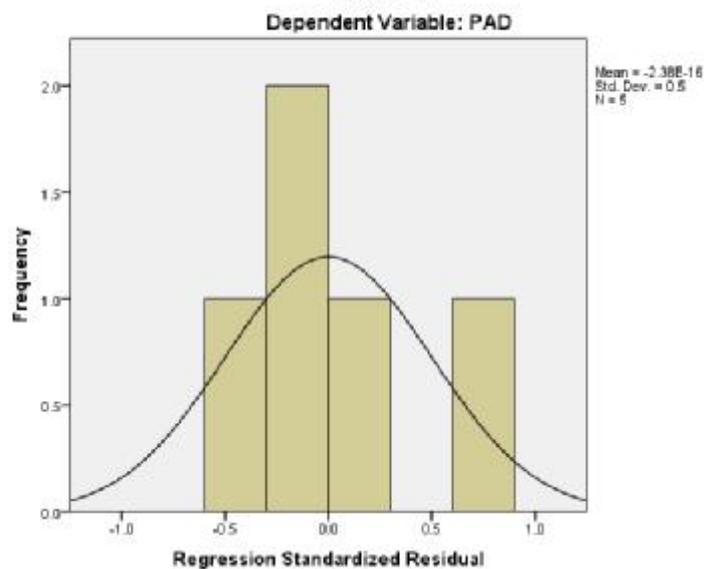
- a.  $X_1$  = PBB (Pajak Bumi Bangunan)
- b.  $X_2$  = Jumlah Penduduk
- c.  $X_3$  = PDRB (*Product Domestic Regional Bruto*)
- d.  $Y$  = Pendapatan Asli Daerah

##### 2. Uji Asumsi Klasik

###### a. Uji Normalitas

Uji normalitas data adalah bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat grafik histogram dan gambar normal P-Plot. Pada grafik histogram, data dinyatakan berdistribusi normal, bila bentuk kurva memiliki kemiringan yang cenderung berimbang, baik dari sisi kanan maupun sisi kiri, dan kurva hampir menyerupai bentuk lonceng yang hampir sempurna. Sedangkan pada gambar normal P-Plot, data dinyatakan normal bila gambar terdistribusi dengan titik-titik data searah mengikuti

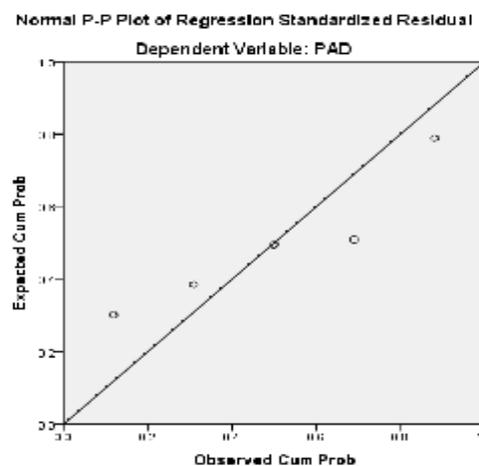
**Gambar 4.1**  
Histogram untuk menguji normalitas



Sumber: Hasil pengolahan SPSS

Pada normalisasi data dengan normal *p-plot*, data variabel yang digunakan akan dinyatakan terdistribusi normal. Hal tersebut terjadi karena titik-titik residual tersebut berasal dari data dengan distribusi normal dan mengikuti garis diagonal atau garis linear. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa regresi telah memenuhi normalitas.

**Gambar 4.2**  
Normal P\_P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

Pada grafik normal P-Plot di atas terlihat bahwa titik-titik meyebar dan berada di sekitar garis diagonal dan searah garis diagonal, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel loyalitas pelanggan dapat dikatakan normal.

### b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolinieritas diperlukan dalam suatu penelitian yang memiliki variabel independen lebih dari satu. Hal ini untuk mengetahui apakah didalam suatu model regresi ditemukan adanya hubungan atau korelasi antar variabel independen. Dengan uji asumsi klasik statistik, multikolinearitas dapat dideteksi dari *output* SPSS pada tabel *coefficients* dan tabel *collinearity diagnostics*. Jika nilai *variance inflation factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas.

**Tabel 4.1**  
**Coefficients**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	95,0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
	Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-4060.039	4691.634					
PBB	-1.001	.881	-.539	-.630	-.580	.546	1.832
JUMLAH PENDUDUK	-1.851	1.864	-.380	.045	.032	.661	1.514
PDRB	-.631	.576	-.161	-.503	-.415	.647	1.546

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil pengolahan SPSS

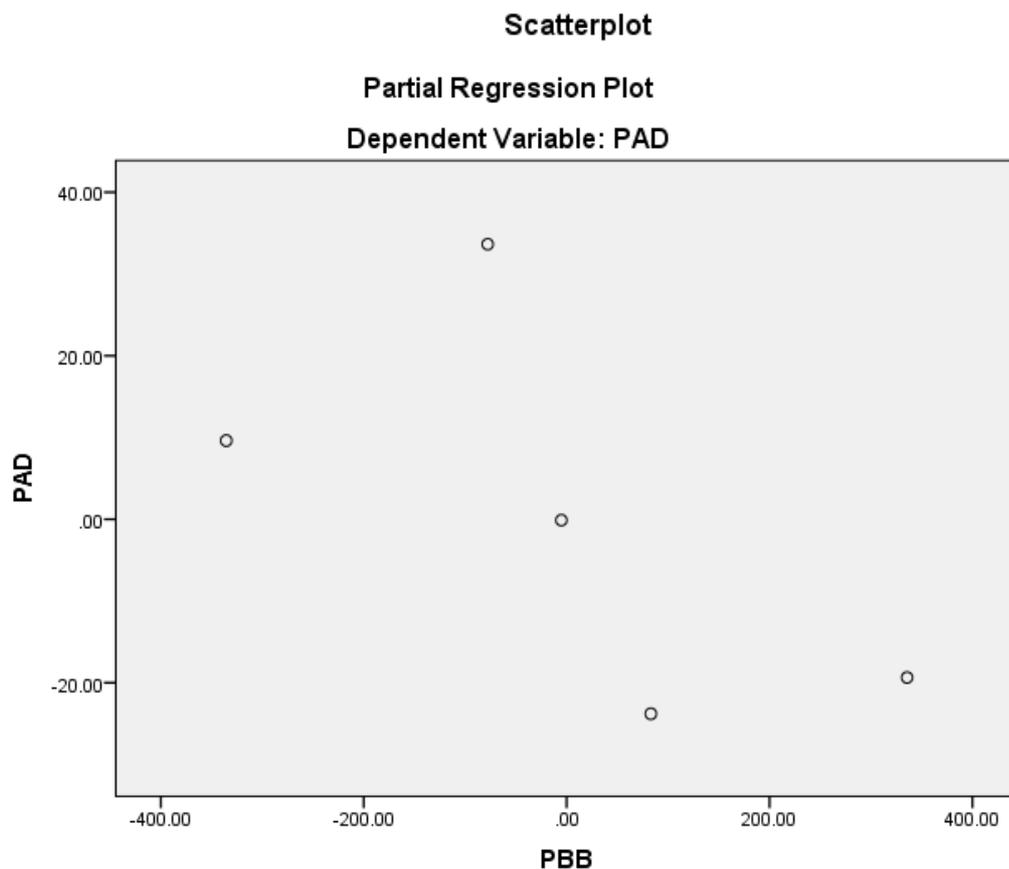
Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa nilai VIF (*Variance Inflasi Factor/VIF*) tidak melebihi batas toleransi (4 atau 5), sehingga tidak terjadi multikonearitas dalam variabel indepen penelitian ini.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Menguji terjadinya perbedaan *variance residual* suatu priode pengamatan kepriode pengamatan yang lain, atau gambaran hubungan antara nilai yang diprediksikan dengan *studentized deleted residual* nilai tersebut.

Cara memprediksi ada tidaknya heterokedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar *scatterplot*. pada model regresi berganda tidak terdapat heterokedastisitas. Jika titik-titik menyebar di atas dan bawah atau sekitar angka 0 maka model regresi tidak terjadi heterokedastisitas.

**Gambar 4.3**  
Residuals Statistics PAD



Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

### 3. Hipotesis

#### a. Uji Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial, bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen (PBB, Jumlah Penduduk dan PDRB) terhadap variabel dependen (PAD). Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel independen dengan

satu variabel dependen yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. Pengujian ini menggunakan kriteria jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak atau variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Dan jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, atau variabel bebas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

**Tabel 4.2**  
Hasil uji T

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	315.798	344.386		.917	.528		
PBB	-.060	.074	-.785	-.812	.566	.546	1.832
JUMLAH PENDUDUK	.007	.146	.040	.045	.971	.661	1.514
PDRB	-.028	.048	-.516	-.581	.665	.647	1.546

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil pengolahan SPSS

Dalam uji t ini dilakukan pada derajat kebebasan (n-k-1), dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Untuk tingkat keyakinan yang digunakan adalah 95% atau  $\alpha = 5\%$ . Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan hipotesis secara parsial adalah sebagai berikut:

- 1) Variabel PBB diperoleh T-Hitung  $-0,812 < T\text{-Tabel } 2,015$ , maka keputusannya adalah  $H_A$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Hasil menunjukkan bahwa PBB tidak berpengaruh terhadap PAD.
- 2) Variabel Jumlah Penduduk diperoleh T-Hitung  $0,045 < T\text{-Tabel } 2,015$ , maka keputusannya adalah  $H_A$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Hasil menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD.

- 3) Variabel PDRB diperoleh T-Hitung  $-0,581 < T\text{-Tabel } 2,015$ , maka keputusannya adalah  $H_A$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Hasil menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap PAD.

**b. Uji Simultan (Uji F)**

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen (variabel PBB, Jumlah Penduduk, PDRB) memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (PAD). Pengujian ini menggunakan kriteria jika  $p\text{-value} < \text{dari } level \text{ of significant}$  yang ditentukan maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, atau dapat melihat nilai F. Jika nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka secara bersamaan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.  $F_{tabel}$  dapat dihitung dengan cara  $df_1 = k - 1$  dan  $df_2 = n - k$ , dimana  $n$  adalah jumlah responden dan  $k$  adalah jumlah variabel dependen dan independen.

**Tabel 4.3**  
Hasil Uji F  
ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1255.727	3	418.576	.321	.824 <sup>b</sup>
	Residual	1305.073	1	1305.073		
	Total	2560.800	4			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), PDRB, JUMLAH PENDUDUK, PBB

Sumber: Hasil pengolahan SPSS

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 0,321 sedangkan  $F_{tabel}$  sebesar 5,41 maka  $F_{hitung} < F_{tabel}$ . Kemudian P-value  $0,000 < 0,05$  artinya signifikan. Maka  $H_a$  diterima dan dapat diambil kesimpulan bahwa variabel  $X_1$  (PBB),  $X_2$  (Jumlah Penduduk) dan  $X_3$  (PDRB) secara simultan (bersama-sama) tidak berpengaruh terhadap variabel Y (PAD).

### c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen (variabel kepercayaan pelanggan dan citra perusahaan) menjelaskan variabel dependen (loyalitas pelanggan) atau untuk mengetahui besar presentase variasi variabel terikat yang dijelaskan pada variabel bebas, maka dicarilah nilai  $R^2$  (R square). Dalam output SPSS, jika koefisien determinasi berkisar antara nol maka hubungan antara kedua variabel dinyatakan lemah. Jika angka lebih mendekati satu maka dinyatakan hubungan antara kedua variabel dinyatakan sangat kuat. Berikut ini hasil SPSS yang menggambarkan tentang nilai ( $R^2$ ) pada penelitian ini.

**Tabel 4.4**  
Hasil Uji R Square

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.700 <sup>a</sup>	.490	-1.039	36.12579

a. Predictors: (Constant), PDRB, JUMLAH PENDUDUK, PBB

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil pengolahan SPSS

Dapat dilihat bahwa nilai  $R = 0,700$  dan  $R^2$  (R square) = 0,490. Artinya bahwa model regresi yang diperoleh mampu menjelaskan didalam variabel PBB, Jumlah Pendudk, PDRB dapat mempengaruhi PAD sebesar 49%, sedangkan sisanya (51%) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain.

## B. Pembahasan

Penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel yaitu: PBB (Pajak Bumi Bangunan), Jumlah Pendidikan, PDRB (*Product Domestic Regional Bruto*) terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan data berupa laporan keuangan

periode 2014 - 2018. Penjelasan masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut:

**1. Pengaruh PBB (Pajak Bumi Bangunan) terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah).**

Berdasarkan hasil analisis di atas mengenai pengaruh antara PBB (Pajak Bumi Bangunan) terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah), dapat disimpulkan bahwa PBB tidak berpengaruh terhadap PAD. Hasil menunjukkan bahwa besarnya nilai anggaran PAD tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh PBB.

Hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rio Rahmat Yusran dan Dian Lestari Siregar (2017) dengan judul penelitian pengaruh BPHTB dan PBB terhadap pendapatan asli daerah di provinsi kepulauan Riau dengan hasil PBB memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi t statistic sebesar  $0,000 < 0,05$ .

**2. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah).**

Berdasarkan hasil analisis data di atas mengenai pengaruh Jumlah Penduduk terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah), dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD.

Hasil analisis data tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Asmuruf dkk. (2015) dengan judul pengaruh pendapatan dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Sorong menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap PAD Kota Sorong.

### **3. Pengaruh PDRB terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah).**

Mengenai pengaruh antara PDRB (*Product Domestic Regional Bruto*) terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap PAD.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asmuruf dkk. (2015) dengan judul pengaruh pendapatan dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Sorong menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Sorong.

### **4. PBB (Pajak Bumi Bangunan), Jumlah Penduduk, PDRB (*Product Domestic Regional Bruto*) terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah)**

Berdasarkan data diatas mengenai PBB (Pajak Bumi Bangunan), Jumlah Penduduk, PDRB (*Product Domestic Regional Bruto*) terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) menunjukkan PBB, Jumlah Penduduk dan PDRB secara simultan (bersama-sama) tidak berpengaruh terhadap variabel Y (PAD).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial untuk variabel Pajak Bumi Bangunan, hasil menunjukkan bahwa Pajak Bumi Bangunan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Kemudian variabel Jumlah Penduduk hasil menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Dan untuk variabel PDRB hasil menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap PAD.
4. Berdasarkan uji F diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa variabel  $X_1$  (PBB),  $X_2$  (Jumlah Penduduk) dan  $X_3$  (PDRB) secara simultan (bersama-sama) tidak berpengaruh terhadap variabel Y (PAD).

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mencoba memberikan saran sebagai masukan :

1. Pemerintah daerah harus menerapkan strategi yang lebih baik dalam meningkatkan pendapatan daerah, agar pemerintah daerah tidak harus bergantung terhadap pemerintah pusat.
2. Dalam penelitian ini jumlah penduduk memiliki pengaruh yang negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah maka Pemerintah Kabupaten Deli

Serdang harus mengintensifkan peningkatan pengawasan wajib pajak bagi penduduk yang berada pada umur produktif dan sudah bekerja untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan situasi yang kondusif

3. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang harus lebih mengoptimalkan penerimaan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga menjadikan PAD menjadi sumber utama belanja daerah, karena PAD merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah menjalankan kewenangannya yang tercermin dari adanya ekonomi daerah.
4. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan). Karena dana PBB (Pajak Bumi Bangunan) yang diperoleh akan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.
5. Pemerintah daerah harus memprioritaskan kesejahteraan masyarakat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dari PDRB (*Product Domestic Regional Bruto*) secara akurat dan merata kedalam lapisan seluruh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, edisi revisi, cetakan keempat belas”*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Asmuruf, F Makdalena., Rimate A. Vikie, dan Kawung, George M. V. (2015). Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Sorong . *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 15(05), 727-736.
- B, Mesra. (2017). Analisis Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Manajemen Tools*. 8(2), 46-57.
- Damaiyanti, Ni Putu Dian., dan Setiawan, I Putu Ery. (2014). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB Terhadap PAD Kota Denpasar Tahun 2009-2013. *E-Jurnal Akuntansi*. 9(1), 97-105.
- Djaenuri, Aries. (2014). *“Hubungan Keuangan Pusat–Daerah, cetakan kedua”*. Jakarta : Galia Indonesia.
- Hafsah. (2015). Efektivitas Pengendalian Intern Pajak Bumi Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. 4(3), 77-94.
- Halim, Abdul. (2014). *“Manajemen Sektor Publik, edisi kedua”*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Kusufi M. Syam. (2014). *“Akutansi Keuangan Daerah, edisi keempat”*. Jakarta : Salemba Empat.
- Harefa, Mandala *et al.* (2017). *“Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah. edisi pertama, cetakan pertama”*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor.
- Hibzon. (2007). Analisis Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 5(2), 106-116.
- Jaya, Gde Perwira Bhaskara dan Widanta, A.A. Putu Bagus. (2014). Analisis Faktor–Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 3(5), 201-208.
- Lestari, Diana. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda. *Conference on Management and Behavioral Studies*. 6(8), 642-651.
- Mardiasmo. (2018). *“Perpajakan, edisi terbaru”*. Yogyakarta : Andi Publisher.

- Mayza, Miragustia., Masbar, Raja., dan Nasir, Muhammad. (2015). “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh”. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. 3(1), 9-16.
- Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2014. Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2012 *Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 *Tentang klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Prana, Riandani Rezki. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Ilman*. 4(1), 74-86.
- Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 12 tahun 2012 tentang Pemerintah Mukim.
- Sari, Diana. (2013). “*Konsep Dasar Perpajakan, cetakan pertama*”. Bandung : Refika Aditama.
- Siahaan, P. Marihot. (2013). “*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, edisi revisi, cetakan ketiga belas*”. Jakarta : Rajawali Pers.
- Suandy, Erli. (2016). “*Hukum Pajak, cetakan kedua*”. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiono. (2012). “*Metode Penelitian Bisnis, cetakan keenam belas*”. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Republik Indonesia.
- Yusran, Rio Rahmat dan Siregar, Dian Lestari. (2017). “Pengaruh BPHTB dan PBB di Provinsi Kepulauan Riau”. *Jurnal Akrab Juara*. 2(3), 73-84.